

Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya
(Journal of Social and Cultural Anthropology)

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos>

**Yang Terbuang, Yang Membangun: Studi Perubahan Sosial Di
Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Oleh Eks Orang-Orang
Buangan 1969-1979**

***The Exiled is The One Who Develop: Study of Social Change in
Waeapo Subdistrict, Buru Regency by Former Exiles 1969-1979***

Naomi S.M Lesbatta*, Widhi Handayani & Pamerdi Giri Wiloso

Program Studi Magister Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin, Universitas Kristen Satya
Wacana, Indonesia

Diterima: 21 April 2021; Direview: 02 Mei 2021; Disetujui: 23 Mei 2021

Abstrak

Kabupaten Buru merupakan salah satu penyuplai beras di Provinsi Maluku. Keberhasilan Kabupaten Buru sebagai pemasok beras Maluku tidak lepas dari sejarahnya sebagai tempat pembuangan orang-orang yang diasingkan pada tahun 1969. Keberadaan eks orang-orang tersebut berpengaruh membawa perubahan sosial di Pulau Buru. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan perubahan sosial di Waeapo, Buru oleh eks orang-orang buangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum eks orang-orang buangan tiba di Pulau Buru, Waeapo didominasi oleh hutan. Penduduk setempat mempraktikkan pertanian berpindah. Kehadiran eks orang-orang buangan pada tahun 1969 mengubah bentang alam Buru dari hutan menjadi persawahan dengan kerja paksa. Kerja paksa dan introduksi sistem pertanian baru merupakan pola yang diwarisi dari pemerintah kolonial. Namun di pulau Buru, hasil panen tidak diserahkan kepada pemerintah seperti lazimnya pada masa kolonial, melainkan dinikmati oleh eks orang-orang buangan. Perubahan tata guna lahan pada akhirnya mengubah sistem perladangan berpindah menjadi pertanian menetap dengan sistem usahatani padi dataran rendah yang lazim dilakukan di Jawa. Eks orang-orang buangan adalah orang-orang yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk melakukan pembangunan di daerah terpencil pada era 1969-1979 hingga terjadi perubahan lanskap Buru, perubahan bahan pangan pokok, dan keragaman budaya di Waeapo.

Kata Kunci: Eks Orang-Orang Buangan 1969; Perubahan Sosial; Alih Fungsi Lahan; Pertanian Menetap; Waeapo.

Abstract

Buru Regency is one of the rice suppliers in Maluku Province. The achievements of Buru Regency as Maluku rice supplier cannot be separated from its history as a place for people who were exiled in 1969. The presence of these former people has an influence on social change in Buru Island. Located in Waeapo district, Buru regency, this qualitative research was conducted to explain social change in Waeapo, Buru by the former exiles. The results showed that before the former exiles arrived at Buru Island, the Waeapo was dominated by forests, where the local people practiced swidden agriculture. The presence of former exiles in 1969 changed the landscape of Buru from forest to paddyfields by means of forced labor. The forced labor and introduction of new agricultural system are patterns inherited from the colonial government. Nevertheless, in Buru, the harvest was consumed by the exiles instead of handed over to the government as a custom enforced by the colonials. The change in land use eventually changed the shifting cultivation system to permanent agriculture with the lowland rice farming system which is commonly practiced in Java. Ex-exiles were the people used by the New Order government to carry out development in remote areas in the 1969-1979 era until the change of Buru's landscape, source of staple food, and cultural diversity exist in Waeapo.

Keywords: 1969 Former Exiles; Waeapo; Social Change; Shifting Cultivation; Permanent Agriculture.

How to Cite: Lesbatta, N.S.M., Handayani, W., & Wiloso, P.G., (2021). Yang Terbuang Yang Membangun: Studi Perubahan Sosial Di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Oleh Eks Orang-Orang Buangan 1969. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 7 (1): 45-53.

*Corresponding author

E-mail: sintia.melwin@gmail.com

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Pulau Buru terletak di sebelah barat Pulau Seram dan berada pada arah barat laut Pulau Ambon. Selain kedua pulau tersebut, beberapa pulau kecil berada di sekitar Pulau Buru, yaitu; Ambalau di sebelah tenggara dan gugusan pulau Manipa, Kelang dan Buano yang membentang di sebelah timur hingga timur laut Pulau Buru (Mansyur, 2012). Secara fisiografi (makro relief), bentuk wilayah Kabupaten Buru dikelompokkan berdasarkan daratan, pantai dan perbukitan termasuk dataran tinggi (*plateau/piedmont*) dengan bentuk kelerengan variatif. Kabupaten Buru didominasi oleh kawasan pegunungan dengan elevasi rendah, berlereng agak curam dengan kemiringan lereng kurang dari 40% yang meliputi luas 15-43% dari keseluruhan luas wilayah daerah ini. Jenis kelerengan lain yang mendominasi adalah elevasi rendah berlereng bergelombang serta agak curam dan elevasi sedang berlereng bergelombang dan agak curam dengan penyebaran lereng di bagian utara dan barat rata-rata berlereng curam sedangkan di bagian timur terutama di sekitar Sungai Waeapo merupakan daerah elevasi rendah dengan jenis lereng landai sampau agak curam (www.burukab.go.id 2018).

Kabupaten Buru merupakan salah satu wilayah di provinsi Maluku yang memiliki produk-produk unggulan dari sektor perkebunan, seperti minyak kayu putih, umbi-umbian, serta sektor perikanan, dan tambang emas yang ada di pulau Buru. Produk unggulan kabupaten Buru tersebut merupakan komoditas ekonomi yang digunakan oleh penduduk lokal Waeapo untuk dapat memenuhi kebutuhan sosial ekonomi lokal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Indonesia mengenal Pulau Buru sebagai lokasi pembuangan tahanan politik pada era Orde Baru. Situasi politik saat itu menyebabkan pemerintah mengambil langkah untuk mengasingkan pihak-pihak

yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Pengiriman tahanan politik dimulai pada tahun 1969 dan diakhiri pada tahun 1979 dengan sekitar 12.000 tahanan politik (selanjutnya disebut *orang-orang buangan*) yang ditempatkan di Pulau Buru (Setiawan, 2004). Saat itu, untuk menampung eks orang-orang buangan tersebut, pemerintah membuka lahan di wilayah Waeapo (sebelah pulau Buru bagian utara) dan membuka lahan persawahan seluas 80-120 hektar untuk unit dengan 500 orang (Setiawan, 2004).

Hadirnya eks orang-orang buangan mengalih gunakan lahan sehingga terjadi perubahan lanskap pulau Buru yang dulunya hutan menjadi sawah. Alih fungsi lahan dari hutan menjadi areal pertanian terbuka dalam kurun waktu yang cukup lama menyebabkan Waeapo mengalami perubahan, baik fisik maupun non-fisik. Perubahan fisik yang dimaksud meliputi berbagai bangunan yang masih dapat di jumpai hingga kini, yaitu gedung kesenian, dan lahan pertanian terbuka dalam bentuk areal persawahan. Sedangkan pembangunan non-fisik tampak dari perubahan pada aspek sosial masyarakat Waeapo yang meliputi keragaman sistem pertanian, sosial, dan budaya, sehingga terjadi perubahan pada pola hidup seperti perilaku dalam interaksi sosial. Gillin dan Gillin *dalam* Soekanto, (1982) menulis bahwa perubahan-perubahan sosial merupakan variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, budaya material, komposisi penduduk, ideologi, maupun penemuan-penemuan baru dari masyarakat tertentu.

Pada saat ini kabupaten Buru merupakan lumbung padi provinsi Maluku. Menurut BPS Kabupaten Buru (2018), luas panen padi Kabupaten Buru tahun 2017 mencapai 11.241 hektar; meningkat 19,51% dari tahun 2016 dengan luas panen 9.406 hektar. Prestasi Kabupaten Buru sebagai lumbung padi yang menyuplai pangan bagi Provinsi Maluku tentu tidak

dapat dipisahkan dari perjalanannya sebagai penjara alam bagi eks orang-orang buangan dari masa Orde Baru sebagai agen pembawa perubahan sosial di Buru. Oleh sebab itu, penelitian ini mempertanyakan “*Bagaimana perubahan sosial pada masyarakat Waeapo, Buru, selama [eks] orang-orang buangan dari masa Orde Baru dibuang ke Pulau Buru?*”

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan perubahan sosial di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru oleh eks orang-orang buangan sebagai agen perubahan di Buru. Mengingat fokus penelitian ini adalah perubahan yang mengindikasikan suatu proses, maka penelitian diarahkan pada dua periode waktu yaitu (1) bagaimana Waeapo sebelum adanya eks orang-orang buangan dan (2) bagaimana perubahan sosial ketika eks orang-orang buangan masuk dan tinggal di Waeapo pulau Buru (1969-1979).

METODE PENELITIAN

Kabupaten Buru terletak antara 2°25' – 3°83' Lintang Selatan dan 125°08' – 127°20' Bujur Timur. Luas Kabupaten Buru wilayah Kabupaten Buru adalah 7.595,58 km² yang terdiri dari luas daratan 5.577,48 km² dan luas lautan/perairan 1.972,50 km² dengan panjang garis pantai 232,18 km². Secara Geografis Kabupaten Buru memiliki batas wilayah dengan Laut Seram di utara, Kabupaten Buru Selatan & Laut Banda di selatan dan Barat, serta selat Mani di timur (www.burukab.go.id.2018).



Gambar 1. Peta Kabupaten Buru
(Sumber: www.burukab.go.id.20)

Waeapo merupakan daerah dataran rendah yang letaknya ditengah Namlea dan Kabupaten Buru Selatan yang dikelilingi oleh pegunungan sambung menyambung dan sungai, bentuk tanah datar yang dipenuhi hutan belukar. Barisan pegunungan dimulai dari dataran Namlea sampai bagian selatan (www.burukab.go.id.2018).

Perjalanan ke lokasi penelitian kecamatan Waeapo hanya bisa ditempuh dengan transportasi laut menuju kota Namlea. Selanjutnya perjalanan dilakukan dengan menggunakan mobil untuk sampai di Waeapo melalui rute perjalanan yang melintasi kampung-kampung penduduk dan sungai. Kendala teknisnya adalah gelombang tinggi pada bulan Mei sampai Juli, sehingga angkutan yang menghubungkan Namlea dan kota Ambon pada bulan tersebut sangat sulit dijumpai. Waktu terbaik untuk datang ke pulau Buru adalah pada bulan Agustus sampai Desember, yang pada saat itu lautnya tenang tanpa gelombang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena memberikan penggambaran yang jelas mengenai subjek dalam penelitian. Menurut Moleong (2012), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap pandangan perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Kajian penelitian ini umumnya dilakukan dengan langkah melakukan studi langsung di lapangan, seperti tinggal di area penelitian dengan maksud memberikan analisa pemecahan masalah berdasarkan data-data.

Dalam kajian ini dilakukan tiga hal: Pertama, studi literatur terdahulu mengenai konsep pulau Buru; Kedua, melakukan wawancara dan pengamatan ke lokasi penelitian untuk mengetahui peran eks orang-orang buangan dalam membawa perubahan di Waeapo. menurut penduduk di desa maupun informan kunci Ketiga, menjelaskan perubahan sosial di Waeapo.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi terhadap sejumlah buku tentang Buru dan literatur terdahulu tentang Pulau Buru. Pengambilan data lapangan dilakukan secara sistematis melalui wawancara mendalam dan observasi. Pengamatan langsung dilakukan untuk lebih mengetahui kondisi dan kenyataan yang terjadi. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari masyarakat dan pemerintah desa meliputi indikator perubahan sosial dan pembangunan. Adapun data sekunder didapat dari literatur terdahulu yang terkait pulau Buru.

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan peneliti antara lain adalah: (1) Mengumpulkan data dari kantor Kecamatan Waeapo terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti pada kecamatan Waeapo, (2) Mengumpulkan data dari informan yaitu (a) eks orang-orang buangan, (b) tokoh masyarakat, (c) masyarakat asli dan (d) pemerintah desa, dengan jumlah total informan untuk penelitian ini enam belas orang.

Para informan tinggal di Kecamatan Waeapo yang terdiri atas tujuh desa, yaitu Yanareja, Waekerta, Waetele, Waekasar, Waenetat, Gogrea, dan Savanajaya. Informan kunci dari tokoh masyarakat ditentukan berdasarkan pengetahuan terhadap sejarah Pulau Buru. Informan dari masyarakat asli adalah mereka yang berada pada masa itu dan dapat menceritakan situasi di Pulau Buru pada masa sebelum para eks orang-orang buangan datang ke Buru. Sedangkan tokoh pemerintah yang menjadi informan adalah staf kantor kecamatan yaitu orang yang mengetahui secara mendalam tentang data yang dibutuhkan. Data dikumpulkan dengan (a) wawancara mendalam selama 120 menit dalam sekali wawancara yang direkam, (b) observasi atau pengamatan langsung pada lokasi penelitian untuk melihat karya-karya

eks orang-orang buangan pada masa Orde Baru yang ada sampai saat ini di Kecamatan Waeapo, dan (c) dokumentasi terhadap lingkungan kerja eks orang-orang buangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Teori poskolonial digunakan sebagai pisau analisis untuk penelitian ini. Semua hasil disajikan secara naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi sosial dan lingkungan Waeapo pada masa sebelum kedatangan eks orang-orang buangan

Buru pada masa lampau adalah hutan lebat dengan sagu sebagai tanaman yang diandalkan oleh penduduk lokal sebagai sumber makanan mereka. Menurut Moses, (2019), seorang informan, penduduk Buru juga memiliki makanan khas yaitu sagu (*papeda*). Tanaman lain yang diolah penduduk menurut Varis, (2019), seorang informan adalah umbi-umbian seperti singkong, keladi, ubi jalar, dan bahan makanan lain seperti jagung, kacang serta padi *gogo*. Selain mengumpulkan sagu, mereka juga bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penduduk lokal Waeapo pada saat itu masih terbatas dari segi pendidikan formal. Namun demikian, kearifan yang mereka miliki diperoleh dari interaksi mereka secara langsung dengan alam. Kehidupan mereka pada kala itu tampaknya seperti kehidupan *indigenous people* di rimba Kalimantan. *Indigenous people* ini dijelaskan melakukan aktivitas pertanian (ladang) berpindah, berburu, mengumpulkan buah dan bahan makanan dari hutan, dengan tujuan utama untuk penghidupan (Yuliani et al, 2018).

Penduduk Buru memiliki budaya seperti pertanian tari-tarian seperti *sawat* Buru dan *cakalele*, serta nyanyian-nyanyian Buru seperti *inafuka* yang lazim dilantunkan pada pelaksanaan ritual tersebut. Tradisi penduduk Waeapo dalam pembukaan lahan kebun baru menurut Les, (2019), seorang informan, adalah untuk meminta ijin pada leluhur dan memperoleh

hasil yang baik. Kearifan lokal penduduk Waeapo digunakan sebagai tatanan sosial yang dikembangkan penduduk lokal untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat dengan melestarikan sumberdaya alam yang ada pada lingkungan mereka. Pengolahan hutan dilakukan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan sumberdaya yang sudah tersedia oleh alam sesuai dengan kearifan lokal yang dipraktikkan secara turun-temurun. Sistem pengolahan pangan dilakukan dengan cara bergotong royong. Guna memenuhi kebutuhan hidup, penduduk lokal Waeapo yang hidupnya di tengah hutan melakukan interaksi dengan hutan melalui cara pengolahan dan pemanfaatan hutan.

Perubahan Kondisi Sosial dan Lingkungan Waeapo pada Masa Kedatangan Orang-Orang Buangan

Hadirnya eks orang-orang buangan dalam wilayah Waeapo membawa perubahan pada kondisi sosial dan lingkungan. Pemerintah pada masa itu membuat upaya untuk mengasingkan para tahanan politik, salah satunya ke pulau Buru. Menurut Di (2019), seorang informan, perjalanan eks orang-orang buangan ke Pulau Buru dimulai dari pulau Jawa dengan menggunakan kapal selama dua minggu untuk sampai di pulau Buru. Setelah itu mereka melewati sungai Waeapo menggunakan kapal yang lebih kecil (*landen*) dan tiba pada muara sungai di Air Mendidih, lalu berjalan masuk ke dataran Waeapo. Setiawan (2004) mencatat bahwa terdapat 12.000 orang yang datang dari pulau Jawa ke pulau Buru lalu menempati 21 unit-unit barak pengasingan. Barak ini berdinding bambu, bertiang kayu dan beratap daun rumbia. Tempat tidur para eks orang-orang buangan juga terbuat dari bambu. Barak ini ditempati 50-100 orang dengan ukuran yang cukup untuk menampung mereka.

Aktivitas eks orang-orang buangan, dimulai dari bangun pagi jam tujuh dan selesai jam lima sore. Mereka beristirahat makan jam satu siang dilanjutkan bekerja kembali jam dua untuk membersihkan lahan sesuai dengan barak masing-masing. Sore jam lima mereka istirahat. Kemudian setelah mandi, mereka berkumpul di tempat yang ditentukan oleh penjaga untuk menerima nasehat-nasehat atau arahan. Menurut Man (2019), seorang informan, pekerjaan yang mereka lakukan yaitu membat hutan bambu, menebang kayu, membuka lahan sawah, dan jalan menggunakan alat parang dan gergaji. Sidi (2019), seorang informan, menyatakan pembangunan fisik dimulai dengan mempersiapkan lokasi persawahan seluas 1-2 hektar. Pekerjaan ini dilakukan dengan jumlah tenaga kerja 500-1.000 orang. Tanaman yang ditanam yaitu padi yang disediakan oleh pemerintah. Unit yang bertapol 500 orang harus membuat sawah rata-rata 80-120 hektar, ladang palawija 60-100 hektar, penggergajian kayu 10-20 pasang dan penyulingan minyak kayu putih 4-6 tahang (Setiawan 2004). Orang buangan juga membuat tanggul selain renovasi barak dan jalan.

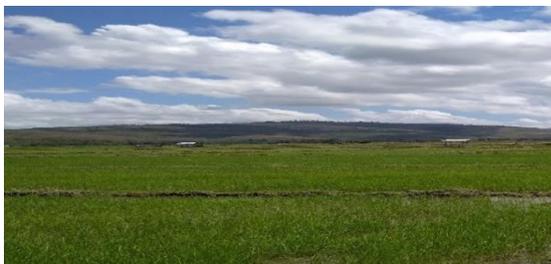


Gambar 1. Jalan pertama yang pernah dilalui oleh eks orang-orang buangan menuju ke Wae Apo. (Sumbernya: Dokumentasi penulis, 2019)

Gambar 1 menunjukkan jalan yang pernah dilalui oleh eks orang-orang buangan pada masa tersebut. Pembangunan infrastruktur merupakan pekerjaan kolektif yang dibuat oleh para eks orang-orang buangan, termaksud pembuatan jalan.

Para eks orang-orang buangan juga sempat mengalami kegagalan panen, karena tidak ada air untuk mengairi sawah. Akibatnya, mereka gagal panen dan unit yang gagal ini dipindahkan masuk ke unit-unit lain. Menurut Gino (2019), seorang informan, selama gagal, mereka tidak dapat makan nasi. Oleh karenanya mereka mengkonsumsi sagu. Menurut An (2019), seorang informan, untuk memperoleh sagu mereka meminta petunjuk dari penduduk lokal. Penduduk lokal menunjukkan kepada eks orang-orang buangan dimana mereka dapat memperoleh sagu dan bagaimana cara pengolahannya.

Setelah gagal panen, eks orang-orang buangan mengulang kembali bertanam padi, hingga akhirnya mereka dapat panen. Setelah panen, mereka bisa kembali makan nasi, dan penduduk lokal juga ikut merasakan nasi. Pada masa gagal panen dan setelahnya terjadi pertukaran informasi antara eks orang-orang buangan dan penduduk lokal yang saling memperkenalkan bahan pangan yaitu sagu dan padi.



Gambar 2. Sawah yang dibuka oleh orang-orang buangan Pulau Buru 1969
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2019)

Gambar 2 menunjukkan Sawah yang dibuat eks orang-orang buangan. Guna mengairi sawah, mereka membendung sungai Waetele. Alat yang dipergunakan untuk bekerja yaitu linggis, cangkul, dan sekop. Sebagai hasilnya mereka dapat mengalirkan air sedikit demi sedikit ke sawah.



Gambar 3. Gedung Kesenian di Pulau Buru
(Sumbernya: Dokumentasi penulis, 2019)

Gambar 3 menunjukkan bangunan yang dibuat oleh eks orang-orang buangan. Menurut Hin (2019), seorang informan, pembuatan Gedung kesenian ini digunakan untuk mementaskan kesenian yang ditonton banyak orang. Selain itu, Gedung Kesenian ini juga mereka gunakan untuk menghibur diri sekali dalam sebulan dengan memainkan musik keroncong atau biola.

Sistim kerja paksa yang diterapkan kepada eks orang-orang buangan adalah pola yang diwarisi dari pemerintah kolonial. Sianipar (2004) menulis bahwa pascakolonial dihubungkan dengan kolonialisme (dari kata dalam bahasa Latin *Colonia* yang artinya pertanian-pemukiman) merupakan teori yang menjelaskan penguasa sebagai penakluk atas tanah jajahan yang dijajah untuk membentuk pemukiman baru (oleh pendatang). Pembentukan kolonial ditandai usaha membubarkan dan membentuk kembali komunitas-komunitas yang sudah ada dengan melibatkan praktek-praktek perladangan, penjarahan, pembunuhan massal, perbudakan, dan pemberontakan-pemberontakan. Lomba (2016) juga menggarisbawahi adanya dua ciri kolonialisme modern (a) daerah-daerah kolonial tidak hanya membayar upeti, tetapi struktur perekonomian daerah koloni (dengan manusia dan alamnya) dirombak demi kepentingan negara induk. (b) daerah-daerah kolonial menjadi pasar yang dipaksa mengkonsumsi produk-produk negara induk. Dalam kemampuan manusia dan sumber alam dari daerah koloni dialirkan sehingga keuntungannya,

oleh sistem yang bekerja akan selalu kembali ke negara induk.

Loomba (2016) juga menulis senada dengan Sianipar (2004) bahwa pascakolonial berasal dari kata *Colonia* yang berarti pertanian atau pemukiman. Loomba (2016) mencatat bahwa kolonialisme merupakan penaklukan dan penguasaan atas tanah dan harta benda rakyat lain. Lebih lanjut, poskolonial adalah teori yang menjelaskan tentang dominasi Barat terhadap Timur (Martayana, 2019). Menurut Ashcroft et al (2017) pascakolonialisme berkaitan dengan efek kolonisasi terhadap budaya dan masyarakat. Teori ini menjelaskan tentang proses, efek, dan reaksi terhadap kolonialisme Eropa dari abad keenam belas sampai saat ini.

Adanya orang-orang yang terpidana merupakan "aset" bagi pemerintah kolonial karena mereka dapat digunakan untuk menjadi pekerja paksa, misalnya di Pulau Banda. Menurut Barjiyah (2010), pembukaan perkebunan pala (*Myristica fragrans*) yang kala itu juga merupakan komoditas penting bagi Belanda, merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap melawan Belanda. Orang-orang tersebut diasingkan ke pulau Banda dengan tujuan membuat perkebunan pala yang hasilnya dapat dinikmati oleh pemerintah kolonial. Pola yang dilakukan oleh pemerintah kolonial ditiru oleh pemerintah Orde Baru dan diterapkan pada eks orang-orang buangan di pulau Buru. Tetapi, dalam hal ini terjadi perbedaan dalam sistem pengolahan hasil yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru. Meskipun sama-sama ditandai dengan penerapan kerja paksa dan introduksi sistem pertanian baru (padi sawah), tetapi dari hasil panen yang diperoleh, eks orang-orang buangan juga turut menikmati hasilnya untuk kebutuhan pangan mereka, selain juga penjaga unit dan penduduk setempat. Ini berbeda dari pola yang ditunjukkan oleh pemerintah

kolonial, yang mengambil dan menikmati hasil perkebunan.

Masa Pembebasan

Masa pengasingan selesai pada tahun 1979. Setelah pembebasan eks orang-orang buangan dikembalikan ke tanah asalnya, meskipun ada juga yang memilih tinggal di Waeapo. Mereka memilih untuk menetap di Waeapo dengan pertimbangan jika mereka kembali ke tanah asalnya, belum tentu mereka akan mendapatkan pekerjaan.

Pada masa ini, perubahan terlihat saat penduduk lokal menerima eks orang-orang buangan untuk menetap di wilayah Waeapo. Interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat terlihat saat terjalin perkawinan antara eks orang-orang buangan dan penduduk lokal Buru. Melalui perkawinan tersebut, terjadi percampuran budaya yang dibawa oleh eks orang-orang buangan dengan penduduk lokal. Waeapo mengalami perubahan budaya sehingga keragaman budaya terjadi di Waeapo.

Program pemerintah di Pulau Buru dilanjutkan dengan program transmigrasi. Para transmigran datang pada tahun 1980-an dari pulau Jawa. Menurut Udin (2019), seorang informan, setiap keluarga transmigran yang masuk ke Waeapo diberikan jatah lahan seluas dua hektar yang terdiri dari satu hektar lahan sawah dan satu hektar untuk pemukiman serta kebun. Tahun 1980 pada awal hadirnya transmigrasi Namun demikian pada masa ini perubahan lanskap Buru menjadi lahan persawahan yang dilakukan oleh para transmigran secara sukarela, sudah mendapatkan dukungan dan fasilitas dari pemerintah.

Perpindahan orang-orang dari Jawa ke pulau lain, baik dalam bentuk pengasingan seperti yang dilakukan terhadap eks orang-orang buangan, maupun secara sukarela dalam bentuk transmigrasi, pada akhirnya mengubah lanskap daerah tujuan mereka. Sebagaimana dideskripsikan sebelumnya, pembukaan sawah dilakukan dengan

membabat hutan, sehingga hutan yang merupakan ekosistem natural beralih menjadi sawah yang merupakan ekosistem artifisial. Menurut Pagiola (2000), alih guna lahan di Indonesia, khususnya di pulau-pulau terluar, disebabkan terutama oleh penebangan hutan pada tahun 1970-an, diikuti oleh transmigrasi yang mencapai puncaknya pada sekitar 1980-an, hingga mendapatkan perhatian dari dunia internasional karena dampak transmigrasi terhadap semakin berkurangnya hutan di Indonesia.

Alih fungsi lahan Waeapo dari hutan tanah kering menjadi areal sawah bukan hanya mengubah lanskap tetapi juga mengubah budaya penduduk lokal. Pembabatan hutan mengurangi populasi pepohonan, dan kemungkinan jenis-jenis pohon yang menjadi sumber pangan penduduk lokal, seperti sagu. Meskipun penduduk lokal bercocok tanam palawija, tetapi sumber daya penyedia pangan mereka menjadi lebih terbatas. Alih guna lahan tersebut menuntut mereka untuk menjadi lebih adaptif terhadap perubahan, terutama karena perubahan tersebut berkaitan dengan pemenuhan makanan mereka sehari-hari. Terkait perubahan kondisi lingkungan, Heyd (2008) mencatat bahwa adaptasi merupakan aspek yang penting bagi manusia karena berkaitan dengan fungsi melindungi kehidupan dan berfungsinya ekosistem.

Mustikawati (2017) mencatat bahwa adaptasi manusia terhadap perubahan lingkungan hidupnya akan ditentukan juga oleh kesiapan manusia dalam menanggapi pemicu perubahan. Kehadiran persawahan membuat penduduk lokal mengetahui bahwa ada sumber pangan yang lain yang dihasilkan dari lahan yang semula hutan. Melalui pertukaran informasi yang mereka peroleh dari eks orang-orang buangan, mereka dapat mengenal makanan yang baru ini, yaitu nasi, meskipun mungkin agak berbeda dari padi gogo yang selama ini mereka konsumsi. Demikianlah, pada akhirnya terjadi perubahan pola makan

penduduk lokal, yang selama ini mengkonsumsi sagu menjadi mengkonsumsi nasi. Hargyono (2015) menulis bahwa intervensi yang dilakukan oleh eks orang-orang buangan bukan hanya mengubah lanskap Buru tetapi juga dalam hal diet penduduknya.

Menurut Hargyono (2016) pembangunan di Buru sesungguhnya membawa motivasi ekonomi untuk menghadirkan pembangunan seperti yang dilakukan di pulau Jawa. Maka, salah satu upaya yang dilakukan adalah membawa mode pertanian Jawa ke pulau yang relatif jarang untuk mengembangkan sistem pertanian. Para *tapol* (tahanan politik) dikirimkan untuk mengintroduksi pertanian padi sawah ke Buru (Hargyono, 2016). Hadirnya padi sawah dalam wilayah Waeapo menunjukkan secara jelas bahwa pembangunan yang terjadi merupakan pembangunan sektor pertanian seperti di Jawa, dengan eks orang-orang buangan dari Jawa digunakan oleh pemerintah untuk mengalihfungsikan hutan menjadi sawah.

SIMPULAN

Pada masa lalu, Waeapo masih didominasi hutan belantara. Masyarakat lokal yang hidup saat itu masih bergantung pada alam dengan menganut sistem pertanian perladangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pendidikan formal pada masa tersebut dapat dikatakan tidak ada, tetapi masyarakat memiliki pengetahuan lokal karena interaksi mereka secara langsung dengan alam. Kehadiran eks orang-orang buangan masuk ke pulau Buru, tepatnya di Waeapo pada tahun 1969 dan berakhir pada tahun 1979. Mereka Mengubah tanah Waeapo yang semula hutan menjadi sawah. Selain sawah, pembangunan fisik yang lain adalah barak, tanggul, gedung kesenian, dan tugu. Kehadiran eks orang-orang buangan yang mengalihfungsikan hutan menjadi sawah turut mengubah sistem perladangan berpindah menjadi sistem pertanian sawah yang awalnya merupakan sistem pertanian

di pulau Jawa. Terlihat bahwa kehadiran eks orang-orang buangan bukan hanya sebagai tahanan melainkan pembawa perubahan pembangunan yang mengarah pada sektor pertanian yang dikembangkan di pulau Buru (Waeapo). Perubahan tersebut membawa perubahan sosial kehidupan penduduk lokal melalui padi yang dibudidayakan oleh eks orang-orang buangan, serta terjalin keragaman budaya dalam Waeapo melalui perkawinan antara eks orang-orang buangan dan penduduk lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashcrof, B., Griffiths, G., Tiffin, H. (2007) *Post-Colonial Studies: The key concepts* (Second edition). New York: Routledge.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru. (2018) *Statistik Daerah Kabupaten Buru 2018*. Namlea: BPS Kabupaten Buru. ISBN 978-602-0985-91-6.
- Barjiyah, U. (2010) Orang buangan (*Bannelingen*) pada perkebunan Pala di kepulauan Banda. *Paramita* 20 (1), 1-10.
- Hargyono, S. (2016) *Buru Island: A Prism of the Indonesia New Order*. Equality Development and globalization Studies Working Paper 36. Illinois: Northwestern University. <https://www.edgs.northwestern.edu/documents/working-papers/buru-island.pdf>
- Heyd, T. (2008) Cultural responses to natural changes such as climate change. *Space population sociétés* 2008 (1), 83-88. <https://journals.openedition.org/eps/2397>
- Loomba, A. (2000). *Kolonialisme atau Pascakolonialisme*. Yogyakarta: Pustaka Prometheus.
- Mansyur, S. (2014). Jejak VOC Kolonial Belanda di Pulau Buru (Abad 17–20 M). *Amerta* 32 (1), 29-47. <https://doi.org/10.24832/amt.v32i1.376>
- Martayana, I.P.H.M. (2019) Poskolonialitas di negara dunia ketiga. *Candra Sangkala* 1(2): 1-22.
- Moleong, L.J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustikawati, A. (2018) Adaptasi lingkungan masyarakat pendatang dalam cerita rakyat Bontang. *Aksara* 30, (1) 51-74.
- Pagiola, S. (2000) *Land use change in Indonesia*. <https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/econ-wp/othr/papers/0405/0405007.pdf>
- Setiawan, H. (2004) *Memoar Pulau Buru*. Magelang: Indonesiatara.
- Sianipar, G. (2004) Mendefinisikan Pascakolonialisme? Pengantar Menuju Wacana Pemikiran Pascakolonialisme. Dalam M. Sutrisno & H. Putranto (Editor). *Hermeneutika Pascakolonial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto, S. (1982) *Sosiologi: suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Yuliani, E. L., De Jong, E.B.P, Knippenberg, L., Bakara D. O., Salim, M. A., Suderlan, T. (2018) Keeping the land: indigenous communities struggle over land use and sustainable forest management in Kalimantan, Indonesia. *Ecology & Society* 23(4), 2-10 <https://doi.org/10.5751/ES-10640-230449> www.burukab.go.id 2018